



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi sekretariat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bandung;
15. Sekretariat Daerah atau yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
20. Jabatan perangkat daerah adalah tingkatan jabatan struktural;
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN TUGAS

## Pasal 2

- (1) Setda merupakan unsur staf
- (2) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

## Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

- (1) Setda, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    1. Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja, membawahkan :
      - a) Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
      - b) Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      - c) Subbagian Tenaga Kerja.
    2. Bagian Pemberdayaan, membawahkan :
      - a) Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
      - b) Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
      - c) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga.

3. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
  - a) Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
  - b) Subbagian Desa;
  - c) Subbagian Kerjasama.
4. Bagian Hukum, membawahkan :
  - a) Subbagian Produk Hukum;
  - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c) Subbagian Bantuan Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, membawahkan :
  1. Bagian Infrastruktur, membawahkan :
    - a) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - b) Subbagian Lingkungan Hidup;
    - c) Subbagian Perhubungan.
  2. Bagian Perekonomian, membawahkan :
    - a) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;
    - b) Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    - c) Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
  3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    - a) Subbagian Kesehatan;
    - b) Subbagian Sosial;
    - c) Subbagian Kependidikan.
  4. Bagian Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Bagian Barjas, membawahkan :
    - a) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - b) Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
    - c) Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
  1. Bagian Umum, membawahkan :
    - a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
    - b) Subbagian Rumah Tangga;
    - c) Subbagian Protokol.
  2. Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    - a) Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
    - b) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
    - c) Subbagian Humas.

3. Bagian Program, membawahkan :
    - a) Subbagian Program;
    - b) Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
    - c) Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.
  4. Bagian Organisasi, membawahkan :
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
    - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
- (2) Struktur Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
  - a. hukum dan politik;
  - b. pembangunan dan ekonomi; dan
  - c. pemerintahan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian pada sekretariat daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

tts

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 59

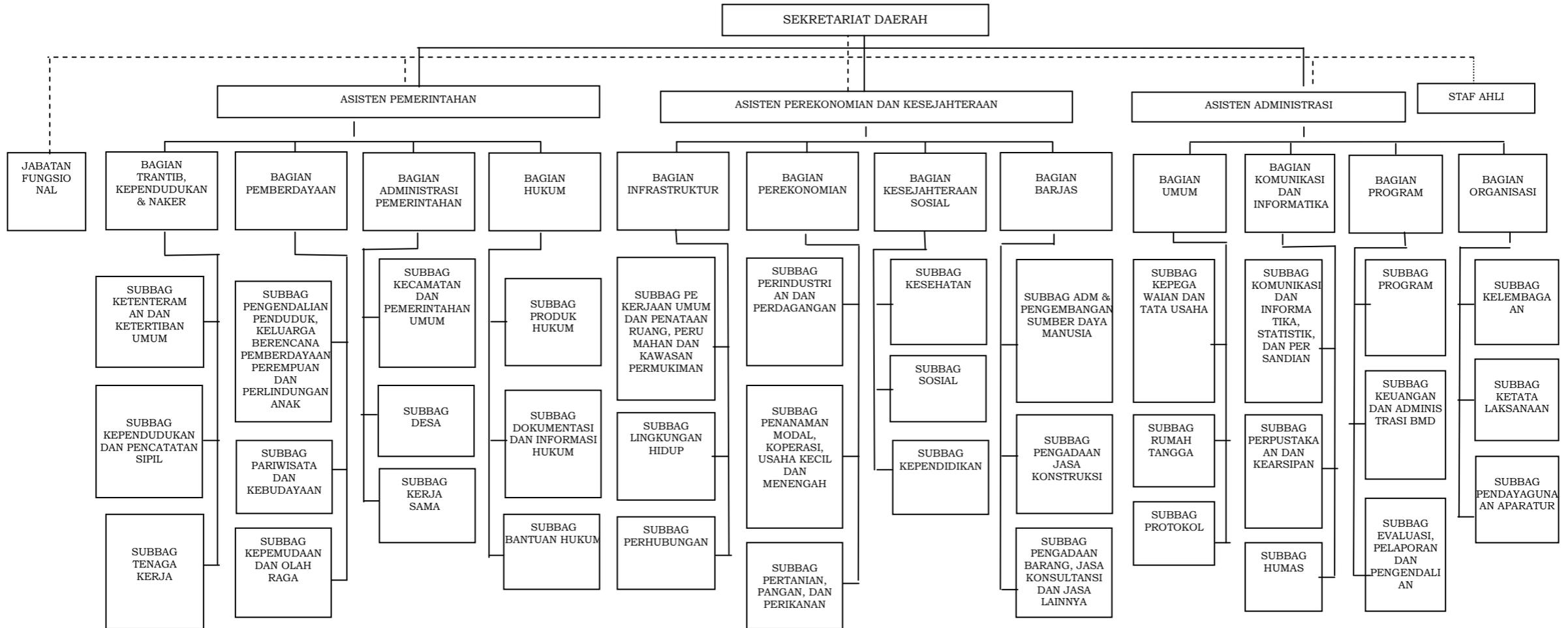
## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 57

NOMOR : 16 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER